

ISLAM DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL: Kontroversi Seputar Presiden Perempuan

Bahrul Ulum

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-Mail: bahrululum@uinjambi.ac.id

Abstract

This article Will highlight many problems on Islam and politics, especially around the arising debate on women president, the case: Megawati Soekarno Putri. The debates are very pierces as many component and element took parts including religious organization and the vest interests of political elements. The debates are of two sides: of traditional-revivalist in one side against its opponent, modernist-liberal, in other side. The first one is represented by the commoners and echoed by Islam puritans, like FPI, Laskar Jihad, Majelis Mujahiddin, and Kisdi. All of them are absolutely rejected women president. The later, represented by Modernist-Liberalist, obviously supported by Moslems Liberal, in Indonesia.

Keywords: Leadership, Islam, Politics,

Pendahuluan

Pembicaraan mengenai Islam dan kepemimpinan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran Islam di pentas perpolitikan Indonesia. Pemimpin dalam syari'at Islam merupakan wakil dan ummat, rupa, seolah-olah dia luput dari perbuatan salah, pemimpin mempunyai tugas yang sangat berat sebagai pengganti tugas kenabian dalam rangka mengatur kehidupan dan mengurus umat mencapai kemashalatan, menegakkan keadilan, konsekwen dari syariat Islam, terwujudnya kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan ummat lewat kerja sama yang baik dan toleransi serta mampu menciptakan keamanan dan ketenangan bagi ummat. Sebagai panutan, pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan, antara lain adil, mempunyai kapasitas keislaman dan mampu secara fisik maupun mental (Raihan Putri, 2015).

Islam dan kepemimpinan nasional seringkali dianggap sebagai dua hal yang bersifat kontraproduktif. *Pertama*, ideologi dengan sistem nilai yang diusungnya serta berasal dari alam kawuruhan-transenden. *Kedua*, bersifat profan dan merupakan persoalan manusiawi (sekuler). Hal tersebut menyebabkan Islam lantas dicap tidak empiris-transformatif dan bahkan tidak manusiawi. Peristiwa Nurcholis Madjid mengumandangkan "Islam Yes, Partai Islam No" pada tahun 1970-an, membuat segenap umat Islam di Indonesia mencapnya kafir. Semestinya, bila Islam Yes, maka Partai Islam juga Yes. Salah kaprah inilah yang kemudian membuatnya dihakimi di Taman Ismail Marzuki dan diteriaki kafir, sesat dan sekuler (Daud Rasyid, 2002: 24-40). Istilah ini

masih menggema hingga kini, terutama jika melihat perilaku para politikus yang senang mempolitisir agama; demi kepentingan kekuasaan, agama sering menjadi tunggangan dan bahkan dikorbankan. Partai Islam, menurutnya, secara empiris sering menunjukkan ekspresi ke arah tersebut yang masih terlihat hingga di masa saat ini.

Di era revolusi industri 4.0, ilmu kepemimpinan secara ilmiah kian berkembang, bersamaan dengan pertumbuhan *Scientific Management* (manajemen ilmiah). Kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada bakat, pengalaman dan laki-laki saja, tetapi juga pada kesiapan secara berencana. Program-program yang ditawarkan dilakukan melalui perencanaan, analisis, dan pengembangan secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan tuntutan syariat agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Peran Islam dalam Sejarah Politik di Indonesia

Penggalan-penggalan sejarah menyisakan memori tentang peran Islam di pentas politik Indonesia. Pengangkatan kembali isu keterkaitan antara Islam dan politik bisa menjadi hal yang “membosankan”. Hal ini disebabkan bukan oleh masalahnya yang tidak menarik, tetapi seringkali ditampilkan dalam bentuk yang begitu-begitu saja (Bahtiar Effendy, 1999: 5).

Secara kronologis, Sarikat Islam (SI) yang didirikan tahun 1912 di Solo dianggap sebagai pembuka pintu gerbang lahirnya Islam politik di Indonesia. Pembentukannya dilatarbelakangi, *pertama*, persaingan dalam soal ekonomi yang banyak dilakoni dan dimonopoli oleh golongan Cina. *Kedua*, sebagai instrumen umat Islam untuk membendung politik pengkristenan pemerintahan Belanda dan kegiatan missionaris (Deliar Noer, 1998: 114-115).

Di panggung politik, SI pernah terlibat dan ikut berpartisipasi di Volksraad (kooperasi). Di dalam Volksraad inilah, Tjokroaminoto dan Agus Muis, pemimpin SI *par excellence*, menjadi bintang karena tuntutan-tuntutannya yang sangat keras untuk memperluas hak-hak Volksraad, pembentukan dewan-dewan daerah dan perluasan hak pilih, penghapusan kerja paksa dan sistem izin untuk bepergian. Dalam mengedepankanuntutannya, keduanya menggalang kerja sama (kooperasi) dengan wakil-wakil lain yang menyetujui pendapatnya (Deliar Noer, 1998: 116).

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki berbagai kepentingan, krisis internal seringkali menjadi pemicu retaknya bangunan sebuah partai. Hal inilah yang kemudian melanda SI yang berujung pada semakin melemahnya partai ini. Searah jarum jam, SI ternyata tidak lagi menjadi partai Islam semata wayang. Selain itu, telah ada pula organisasi lain seperti Al-Irsyad, Muhammadiyah, dari kalangan modernis, dan NU sebagai representasi dari kelompok Islam tradisional. Kendati sama menyandang sebagai organisasi Islam, masing organisasi tak jarang terlibat konflik dan ketegangan (Deliar Noer, 1998: 130).

Dalam kondisi demikian, Soekarno (si pejuang muda kala itu), mendeklarasikan sebuah organisasi berwajah nasionalis bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) dibentuk dengan tujuan memperoleh kemerdekaan penuh bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara politis, di bawah satu pemerintahan yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia (Kahin, 1995: 116). Walaupun

Soekarno dan tokoh-tokoh PNI banyak yang beragama Islam, secara tegas dikatakan bahwa partai itu tidak boleh berdasarkan agama Islam, karena kemerdekaan adalah tujuan baik yang Kristen maupun Islam (Kahin, 1995: 116). Deliar Noer menyebut golongan ini sebagai nasionalis yang netral agama (Noer, 154), satu istilah yang digunakan untuk membedakannya dengan orang Islam yang menjadikan Islam sebagai ideologi politiknya.

Sejak tahun 1930-an, kaum nasionalis memiliki posisi yang semakin kuat dengan bertambahnya intelektual pegiat didikan Barat yang baru pulang dari Belanda dan membentuk beberapa partai baru beraliran nasionalis. Pada gilirannya, penganut paham nasionalisme berhasil menggeser pendukung Islam ideologis dalam menentukan arah kaum pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Implikasi paling serius dari peristiwa itu adalah terjadinya pertarungan ideologis antara kelompok nasionalis yang terus mewarnai wacana dan politik Indonesia, terutama menyangkut hubungan antara agama (Islam) dan negara di masa Indonesia merdeka (Effendy, 70). Hubungan Islam dan negara kala ini lebih bersifat antagonistik, negara sering mencurigai Islam sebagai ideologi yang akan mengancam negara. Sebaliknya umat Islam juga sangat keras memperjuangkan agenda keislamannya.

Namun seiring dengan masuknya Jepang ke Indonesia, sedikit-banyak memberi angin segar bagi berdirinya partai Islam. Dengan kepentingan untuk memobilisasi massa guna memenangkan Perang Pasifik, Jepang tidak segan-segan mensahkan berdirinya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) tahun 1943, dan disahkan Perikatan Umat Islam di Majalengka dan Persatuan Islam di Sukabumi tahun 1994, hal mana tidak dirasakan oleh kalangan nasionalis-sekuler (Noer, 1987: 22).

Kendati demikian, menjelang kemerdekaan Indonesia, kekecewaan segera menimpa kalangan Islam karena Jepang membubarkan semua organisasi tersebut (Benda, 1980: 155-233). Hal ini kembali terulang ketika Jepang mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Di dalam dua forum ini, kalangan Islam tidak terwakili dengan baik dilihat dari segi kualitas maupun jumlah anggota yang semuanya diangkat oleh Jepang. Di sisi lain, kelompok nasionalis-sekuler yang tadinya sedikit terpinggirkan justru mendapat porsi yang lebih besar, ketimbang golongan Islam. Pada gilirannya, Jepang bukan hanya membuat kaum nasionalis lebih mendominasi persoalan persiapan kemerdekaan, melainkan juga menguatkan polarisasi nasionalis-sekuler versus Islam sebagaimana tampak dari perdebatan keras mengenai dasar negara yang berlangsung dalam rapat-rapatnya.

Walaupun begitu, setelah kemerdekaan, partai-partai Islam tetap eksis, bahkan dua di antaranya merupakan primadona yakni NU dan Muhammadiyah. Lewat kesepakatan ulama dan tokoh-tokoh politik Islam, pada tanggal 7 November 1945, terbentuk Partai Islam Masyumi yang merupakan peleburan dari NU, Perikatan Umat Islam, Persatuan Umat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan beberapa organisasi Islam kedaerahan lainnya (Noer, 48-50). Di masa selanjutnya, kebesaran Masyumi tidak dapat diragukan lagi. Prestasi paling cemerlang ditunjukkannya pada rentang 1945-1957, para tokohnya banyak mengisi posisi sebagai menteri bahkan perdana menteri. Dalam rentang waktu itu tercatat tiga tokoh Masyumi memimpin kabinet, yaitu M. Natsir,

Sukiman, dan Burhanuddin Harahap. Ketika nama yang disebut terakhir ini menjabat sebagai Perdana Menteri, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilu yang diikuti oleh banyak partai dan berlangsung secara demokratis yang kualitasnya mungkin hanya bisa ditandingi oleh pemilu 1999 dan 2004 lalu. Periode itu juga menyaksikan bahwa Masyumi mampu mendudukkan empat atau lima orang tokohnya dalam setiap kabinet, kecuali dalam kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) di mana Masyumi memang tidak bersedia masuk dalam kabinet (Zainal Abidin Amir, 2003: 44).

Dalam perjalanannya, Masyumi ternyata juga gagal mempertahankan supremasinya sebagai satu-satunya partai Islam lantaran persoalan klasik, yakni konflik internal yang berujung pada disintegritas partai. Puncaknya, NU, sebagai salah satu basis utamanya, memilih henggang dan memisahkan diri. Salah satu faktornya, orang-orang NU seringkali merasa dilecehkan oleh tokoh-tokoh pembaharu Masyumi sebagai kelompok yang tidak ada apa-apanya (Martin van, Bruinessen, UN. 1994: 62). Untuk “membalas sakit hatinya” NU kemudian mengambil langkah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah partai politik tahun 1952, yang diarsiteki oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Pemilu 1955 menjadi saksi supremasi NU sebagai partai Islam dengan meraih suara 18.4%. Suara itu meningkatkan perolehan kursi NU di parlemen dari 8 menjadi 15 kursi. Akan tetapi, kemenangan ini tidak segera diikuti oleh suasana yang kondusif. Di bawah sistem kepartaian pada Demokrasi Terpimpin yang bersifat “No Party System” (Amir, 44), partai-partai politik nyaris tidak berguna. Ibarat lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Partai-partai Islam seringkali mengalami pengekan pada masa Orde Baru. Dengan manuver politiknya, Soeharto berhasil melakukan pemerjeran partai-partai (Effendy, 2000: 198). NU sendiri harus menerima difusi dalam PPP, hingga akhir hayatnya ketika mengundurkan diri dari dunia politik praktis menuju *khittah*-nya tahun 1926 (Bahrul Ulum, 2003: 86).

Partai-partai Islam bermunculan kembali (1999) setelah lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan (1998). Bahkan dengan semangat *euforia*, partai-partai ini menjadi hal yang tak terkendalikan. Sebanyak 48 partai yang ada, 20 di antaranya adalah partai berbasis Islam (Kamaruddin, 2003: 66-67), termasuk NU dengan malu-malu menyodorkan PKB sebagai representasinya. Inilah kali pertamanya, presiden terpilih (Gus Dur) berasal dari partai berbasis massa Islam, bahkan berhasil menempatkan tokoh-tokoh Islam dalam kabinetnya.

Meminjam istilah Bahtiar Effendy, Islam memang tidak pernah berhenti berpolitik. Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu jumlah partai mengalami penciutan, akan tetapi aura gerakan Islam masih terlihat sangat jelas. Kali ini, peran Islam politik nampak jelas pada kemenangan Partai Keadilan Sejahtera, yang mengungguli partai-partai besar lainnya dengan capaian 8.3 juta suara. Ini menunjukkan bahwa gerakan Islam senantiasa muncul di setiap saat.

Normativitas dan Historisitas Islam di Pentas Politik

Normativitas yang dimaksud di sini adalah Islam ideal, teoritis atau Islam yang seharusnya. Sedangkan historisitas, di sini, berarti Islam fenomena, Islam kontekstual,

atau Islam senyatanya. Dua ekstrim (*normativitas vis a vis historisitas*) ini harusnya menjadi ulasan yang menarik mengingat bahwa keduanya seringkali bertemu dalam bentuk yang sangat kontradiktif.

Ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan, di antaranya mengapa tren Islam politik seolah tidak pernah berhenti berdenyut? Apa yang dicari dalam dunia yang profan (kotor) semacam ini? Bukankah Islam cukup hanya mengurus urusan akhirat seraya menyerahkan persoalan negeri pada para ahlinya? ((Kamaruddin, 2003). Ada semacam kegamangan bagi sebagian orang, bahwa Islam kurang mampu menjawab soal-soal yang terkait dengan masalah keduniaan, termasuk soal politik. Sehingga ketika Islam diartikulasikan dalam bentuk partai politik, yang terjadi adalah kontraproduktif. Realitas empiris sering bertabrakan dengan idealisme Islam, seperti soal hubungan Islam dan negara.

Hal ini menjadi sangat menarik lantaran perjuangan umat Islam dalam bentuk gerakan politik pada dasarnya berlanjut hingga ke tingkat negara. Hal ini berarti ada suatu hal pada visi Islam yang harus menjadi agenda negara. Hal menarik lainnya adalah bahwa agenda-agenda (partai) Islam itu seringkali tidak beranjak pada soal-soal syari'at atau minimal demi membela kepentingan (umat) Islam.

Dalam hal ini, paling tidak ada tiga sikap yang menonjol. *Pertama*, integritalistik, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Islam dan negara merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dan menyatu (*integrated*) antara satu dengan lainnya. *Kedua*, simbiotik, yakni pendapat yang mengatakan bahwa Islam dan negara adalah dua entitas yang berbeda; agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sedangkan negara merupakan hasil interaksi antar sesama manusia (*mu'amalah*). Namun, keduanya dapat saling membutuhkan; negara butuh agama dalam hal moral etis, sedangkan agama butuh negara sebagai instrumen dalam mengembangkan dan melestarikan ajaran agama. *Ketiga*, sekularistik, yang menganggap bahwa Islam dan negara memiliki garapannya sendiri-sendiri dan tidak boleh saling mengintervensi.

Perubahan iklim dan pengalaman masa lalu ternyata sedikit-banyak telah mengubah paradigma politik Islam dewasa ini. PKB, bahkan dengan tegas mengatakan bahwa Negara Kesatuan dengan dasar Pancasila merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia (Amir, 94). Bahkan PKS yang sering dicap sebagai pengejawantahan gerakan Islam "revivalis" (Furkon, 2003), sedikit mengubah laku politiknya dengan bersikap akomodatif terhadap gagasan demokrasi.

Kepemimpinan Islam di Indonesia

Istilah kepemimpinan dalam Islam bukan merupakan hal yang asing dalam dunia Islam. Jauh-jauh hari, Nabi SAW., pernah bersabda bahwa: "setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya" (HR Bukhari dan Muslim).

Refleksi yang paling mudah dipahami dari hadits di atas adalah pesan moral bagi setiap orang (sebagai pemimpin) yang secara normatif maupun kultural harus memikul beban sejarah bernama "tanggung jawab." Inilah, yang agaknya, tercermin jelas dalam istilah-istilah kepemimpinan politik Islam dengan gelar-gelar simbolik, seperti al-Imam, al-Khalifah, dan Amir Mukminin. Sekalipun ketiga peristilahan itu mengacu pada kategori "pemimpin" pada umumnya, namun lebih dari itu gelar-gelar simbolik

itu juga menyiratkan secara jelas kekuasaan plus etika moral. Karenanya, dalam tradisi Islam, menjadi seorang Imam, Khalifah, atau Amir al-Mukminin, bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, secara emosional, pemimpin tidak hanya dituntut agar mumpuni dalam soal manajemen kenegaraan. Lebih dari itu, secara normatif, tuntutan akan tanggung jawab kepada Tuhan adalah syarat utama yang juga harus disandangnya. Sehingga seorang pemimpin dalam Islam adalah seorang negarawan yang sekaligus mengemban misi-misi ketuhanan di muka bumi (Mubarok dan Wawoho, 2003: 14-19).

Kesadaran seperti itu tampaknya menjadi warna tersendiri dalam pergulatan mencari pemimpin dalam masyarakat muslim, dengan apa yang kemudian bisa disebut sebagai “pemimpin normatif.” Tolok ukurnya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunah, atau perilaku para Sahabat Nabi. Nah, kesadaran semacam ini pula yang umumnya dipegang oleh masyarakat Indonesia yang nota bene mayoritas Muslim. Sebab bukan secara kebetulan bahwa semua presiden di Indonesia adalah Muslim, tetapi kesadaran kolektif semacam ini sepertinya masih kuat mengakar dalam masyarakat Muslim Indonesia, sekalipun ia memiliki latar belakang dan ideologi nasionalis. Sebab, lagi-lagi dengan tidak menyandang sebagai “negara Islam,” peran umat Islam dalam pentas kepemimpinan nasional terbilang sangat spektakuler.

Perdebatan Perempuan sebagai Calon Presiden

Tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Suhu politik menjelang pesta demokrasi akbar ini memanas, bahkan sempat mencuat isu di kalangan umat Islam melalui selebaran-selebaran gelap yang mendiskreditkan salah seorang calon presiden. Persoalannya cukup sederhana bahwa salah satu calon presiden tersebut memiliki latar belakang dan berafisiliasi dengan kalangan Kristen sehingga dianggap tidak layak, dan bahkan dianggap dapat membahayakan posisi umat Islam. Agama dalam hal ini telah menjadi alat legitimasi bagi kelayakan seorang pemimpin negara. Bahkan jauh hari sebelum itu, perdebatan tentang masalah boleh tidaknya mengangkat wanita sebagai presiden telah mengemuka di kalangan umat Islam. Perdebatan ini terbilang cukup rumit lantaran melibatkan berbagai elemen partai dan organisasi keagamaan, terlebih ketika persoalan ini disentuh lewat kepentingan-kepentingan dan sentimen politis.

Perdebatan seputar presiden wanita dalam kancah pemikiran Islam di Indonesia menjadi semarak setelah Megawati Soekarnoputri dicalonkan sebagai presiden. Umat Islam pun sibuk memperdebatkan tentang status hukum wanita menjadi pemimpin negara. Dalam hal ini, terdapat dua kubu besar yang saling bertolak belakang; kalangan tradisionalis-revivalis, dan kalangan modernis-liberalis. Kalangan tradisionalis-revivalis diwakili oleh kalangan masyarakat awam dan disuarakan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, seperti FPI, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin, dan KISDI (Khamami Zada, 2002: 138). Dengan berangkat pada dalil-dalil Al-Quran, Sunah, Ijma’, dan Qiyas, kelompok tersebut secara serentak menolak secara mutlak wanita menjadi presiden.

Kelompok pertama ini benar-benar memahami, secara literal, ayat Al-Quran (QS. An-Nisa: 34), “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” Begitupun dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa: “Selamanya tidak pernah

bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada kaum perempuan.” Sehingga berdasarkan hadits inilah, maka seluruh imam mazhab, seperti Maliki, Hanafi, Syafi’i, Hambali, termasuk pakar-pakar siyasah seperti Ibn Khaldun, al-Ghazali, al-Mawardi, menyatakan bahwa di antara syarat seorang diangkat menjadi kepala negara adalah laki-laki (Adian Husaini, 2001: 77-78).

Untuk memperkuat argumen di atas, kelompok yang menolak presiden wanita ini, juga merujuk pada ijma’ ulama. Misalnya, dalam al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah, karya Syaikh Abdurrahman al-Jazini, juz 5 halaman 416, dinyatakan bahwa: “Telah sepakat para ulama bahwa imam disyaratkan: pertama harus seorang Muslim ..., keempat bahwa imam harus seorang laki-laki.” Dan selanjutnya adalah qiyash, yakni dalil syar’i yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh memimpin laki-laki dalam salat berjamaah. Maka *mafhum mufaqqah*-nya adalah jika dalam salat berjamaah (*al-imam al-shugra*), wanita tidak boleh memimpin laki-laki apalagi dalam kepemimpinan negara (*al-imam al-kubra*) (Zada, 139). Berdasarkan dalil-dalil tersebut, kelompok-kelompok tradisional-revivalis menolak presiden wanita bahkan sampai pada tingkat pengharaman dengan alasan melanggar aturan-aturan normatif di atas justru akan menyebabkan kehancuran dan azab dari Allah.

Berbeda dengan kelompok pertama di atas, kelompok Islam modernis-liberalis, yang secara jelas diwakili oleh kelompok Muslim Liberal Indonesia justru menerima keberadaan presiden wanita sebagai sesuatu yang normal dan tidak bertentangan dengan agama dan sejarah. Apa yang dikemukakan oleh kelompok tradisional-revivalis di atas tidak lain karena pendekatan yang terlalu literal dan simplistik. Maka di kalangan kelompok modernis-liberalis, pendekatan kontekstual justru sangat penting untuk menghidupkan pesan moral suatu ayat atau hadits. Sebab apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, misalnya, dengan mengangkat Syifa’ binti Abdullah al-Adawiyah sebagai *muhtasib* (pengawas pasar) dapat dijadikan rujukan untuk bersikap terbuka terhadap kepemimpinan perempuan (Zada, 139).

Selain itu, dalam konteks masyarakat modern sekarang ini, sistem demokrasi sudah merupakan sesuatu yang niscaya dalam sistem pemerintahan, peran dan kedudukan perempuan juga bersifat umum sama dengan kaum pria, seperti soal kementerian, DPR, perkantoran (Zada, 140). Secara umum dapat disaksikan bahwa peran-peran itu ternyata dapat dijalankan sama baiknya dengan kaum pria.

Apa yang dikemukakan sejauh ini menunjukkan bahwa peran agama (Islam) dalam soal kepemimpinan nasional tidak bisa diabaikan. Terlepas apakah penafsiran-penafsiran terhadap agama itu bersifat tekstual atau kontekstual, gerak langkah memilih pemimpin paling tidak harus mendapatkan rujukan normatif di samping pertimbangan akan kapabilitas intelektual dan manajerialnya.

Simpulan

Kepemimpinan dalam Islam tidak harus berkuat pada instansi-instansi -dan kemudian diperjuangkan melalui organisasi-organisasi (partai)- yang memakai label Islam. Lebih dari itu, nilai-nilai Islam itulah yang sejatinya harus ditransformasikan dalam kehidupan berpolitik, bukan pemimpin yang berasal dari Partai Islam yang diperlukan, melainkan pemimpin yang tunduk pada nilai-nilai Islam. Partai berbasis

Islam muncul sebagai sebuah perubahan paradigma dari kaum santri, yang sering dituduh sebagai kelompok “sarungan” yang hanya mampu mengurus pesantren, tetapi tidak memiliki kemampuan manajerial mengurus negara. Hal ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas dan bermoral, seperti yang berusaha ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Namun, hal tersebut bukan ukuran utama untuk menghasilkan pemimpin plus, karena apapun platform dan partainya seorang pemimpin diharapkan dapat lebih menonjolkan komitmen moral dan adabnya. Selain itu, sepanjang sejarah kepemimpinan nasional di negeri ini, Indonesia selalu dipimpin oleh orang Islam. Kepemimpinan nasional dengan visi Islam memang menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia, bukan karena kuantitas mayoritas umat Islam, namun peran dan aktivitasnya yang begitu besar.

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang unik dan urgen dibicarakan, bahkan selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung hilang. Hal ini disebabkan kepemimpinan merupakan akad timbal balik antara pimpinan dan rakyat yang tugasnya cukup kompleks, sebagai pelayan ummat yang harus mampu mewujudkan rasa keadilan, menciptakan rasa aman, menjaga disintegrasi sampai pada kemampuan mendapatkan Negara Baldatun Thaiyibatun Warabbun Ghafur. Perempuan juga berhak untuk memimpin, dalam lembaran sejarah Islam, Istri Rasulullah SAW, Aisyah r.a. juga pernah berperan dalam kancah kepemimpinan bahkan dalam peperangan. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi Khalifah di muka bumi sebagaimana diberikan kepada laki-laki, namun dengan satu konsekwensi yaitu mampu mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya kepada Allah SWT.

Referensi

- Abdallah, Ulil Abshar dalam Kompas, 13 Februari 2001
- Amir, Zainal Abidin. (2003). *Peta Islam Politik Pacsa-Soeharto*. Jakarta: LP3ES
- Al-Asqalani, Ibn Hajr, *Fath al-Bari Bisyarh Shahih Bukahri*, juz x, Beirut: Dar al-Fikr
- Benda, Harry J., (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Pendudukan Jepang*. terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya
- Bruinessen, Martin van. (1994). *UN, Tradisi, Relasi-Relasi Partai Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS
- Effendy, Bahtiar. (1999). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Effendy, Bahtiar. (2000). *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung: Mizan
- Furkon, Aay Muhamad. (2003). *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju
- Husaini, Adian. *Presiden Wanita: Pertaruhan Sebuah Negara Muslim*. Jakarta: Darul Falah
- Kahin, George McTurnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. terj. Nin Bakdi Seomanto, Jakarta: UNS Press & Sinar Harapan.

- Kamaruddin. (2003). *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Visi Publishing
- Mubarok, Achmad dan B. Wawoho. (2003). *Etika dan Moral Kepemimpinan*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Noer, Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987
- Noer, Deliar. (1998). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. cetakan keempat, Jakarta: LP3ES
- Rasyid, Daud. (2002). *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*. Jakarta: Akbar Media Aksara
- Roy, Oliver. (1996). *Gagalnya Islam Politik*. terj. Harimurti & Qamaruddin SF, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Ulum, Bahrul. (2003). *Bodohnya NU apa NU dibodohi?: Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Zada, Khamami. (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju
- Zahra, Abu [ed]. (1999). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah